

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP TINGKAT PELAPORAN
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)***

PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

BAGUS PRIO PRASOJO
NIM. C2C006031

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Bagus Prio Prasajo

Nomor Induk Mahasiswa : C2C006031

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Sripsi : **PENGARUH *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP
TINGKAT PELAPORAN *CORPORATE*
SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI
INDONESIA.**

Dosen Pembimbing : Drs. Daljono, M.si, Akt

Semarang, 11 Maret 2011

Dosen Pembimbing

Drs. Daljono, M.si, Akt

NIP. 196409 15199303 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Bagus Prio Prasajo

Nomor Induk Mahasiswa : C2C006031

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP TINGKAT PELAPORAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
(CSR) DI INDONESIA.**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal : 29 MARET 2011

Tim Penguji :

1. Drs. Daljono, M.si, Akt (.....)
2. Hj. Indira Januarti, SE., M.Si., Akt. (.....)
3. Puji Harto, SE., M,si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Bagus Prio Prasajo, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : *PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TINGKAT PELAPORAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI INDONESIA*, adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima

Semarang, 11 Maret 2011

Yang membuat pernyataan

(Bagus Prio Prasajo)

NIM : C2C006031

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini sebagai wujud bukti, kasih sayang dan terima kasihku
pada kedua orang tuaku tercinta.

“Dimana ada niat disitu ada petunjuk dan dimana ada usaha disitu ada jalan,
karena ALLAH Maha Mengetahui.”

Berusaha menjadi sahabat bagi orang lain, maka orang pun akan menjadi sahabat
bagi diri kita.

ABSTRACT

The objectives of this research was to analyze which elements of corporate governance that influence the extent of corporate social responsibility (CSR) reporting in the companies which operate in the sector related to the natural resources or mining companies in Indonesia. Corporate governance elements which were used, namely size of the board commissioner, independent commissioner and board meetings. The extent of CSR reporting was measured used corporate social disclosure index (CSDI) based on Global reporting index (GRI) reporting standard items which were disclosed in companies' annual report. This research also used firm's size, profitability and leverage as control variables.

The population of this research was all companies which operate in the sector related to the natural resources or mining companies that listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) in 2007-2009. Total sample of the research became 41 companies. Multiple regression method was used to analyze the relationship between corporate governance elements and CSR reporting.

The result show that size of board commissioner and board independent has a significant effect toward the extent of CSR reporting.

Keyword: Good Corporate Governance, Profitability, Leverage, Firm Size, Corporate Social Responsibility.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis elemen *corporate governance* apa saja yang mempengaruhi tingkat pelaporan *corporate social responsibility* (CSR) pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang berkaitan dengan sumber daya alam atau pertambangan di Indonesia. Elemen *corporate governance* yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan jumlah rapat dewan komisaris. Tingkat pelaporan CSR diukur dengan menggunakan *corporate social disclosure index* (CSDI) berdasarkan item standar pelaporan *Global Reporting Index* (GRI) yang diungkapkan di dalam *annual report* perusahaan. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* sebagai variabel kontrol.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2009. Dengan jumlah sampel penelitian adalah 41 perusahaan. Regresi berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara elemen *corporate governance* dan tingkat pelaporan CSR.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan komisaris independen yang berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pelaporan CSR.

Kata kunci: *Good Corporate Governance*, Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Corporate Social Responsibility*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur hanya milik Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP TINGKAT PELAPORAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* DI INDONESIA”** dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah pada junjungan dan panutan kami, Rasulullah Muhammad SAW. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Jurusan Akuntansi.

Penulis menyadari bahwa terselesaikan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Daljono S.E., M.Si., Akt., Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Prof. Dr. Much. Syafrudin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.

4. Bapak Prof. Dr. H. Arifin Sabeni., Mcom., (Hons)., Akt., selaku dosen Wali yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan dari awal perkuliahan hingga semester akhir.
5. Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh karyawan bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi UNDIP, atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Bapakku (Poernomo Sasmito) dan Ibuku (Tumini Martha), orang tua yang luar biasa. Terimakasih atas doa, perhatian, kesabaran, dukungan, semangat, dan ridhonya yang selalu diberikan. Semoga aku bisa membuat bapak ibu bangga.
8. Miranti Purnasari dan Tantri Apriliani, dan segenap keluarga besar yang telah memberikan doa, ridho serta memberikan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terbaik (Nurul, Fifi, Titis, Wati, Dian, Arif, Rizky, Putri, Rangga, Febri, Aji, Iqbal, Ginanjar, Naya, Betsy, Ari, Pune, Vaza, Weda, Ivan) yang telah memberi berbagai macam hal dalam kehidupan kampus. Tidak akan terlupa segala kisah dan canda ceria kita semua, kawan. Semoga silaturahmi tidak akan pernah putus sampai tua.
10. Sahabat-sahabat alumnus SMU Pembangunan Jaya Tangerang, Aga, Radityo, Ajeng, Christin, Haryo.

11. Angkatan 2006 Akuntansi Universitas Diponegoro atas semua hal yang telah dilalui bersama dalam suka maupun duka
12. Terima kasih untuk Diah Aristya Hesti atas kesabaran, dorongan dan doanya yang telah diberikan kepada penulis agar selalu memberikan yang terbaik.
13. Terima kasih untuk semua pihak yang membantu selesainya kuliah dan skripsi ini, yang mungkin terlewat untuk disebutkan.

Penelitian skripsi ini tentu jauh dari sempurna, karena memang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Penulis sangat terbuka dan berterima kasih terhadap segala masukan dan kritik membangun untuk memperluas wawasan penulis dan perbaikan karya ilmiah ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 11 Maret 2011

Penulis

Bagus Prio Prasajo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Legitimasi.....	10
2.1.2 <i>Corporate Social Responsibility</i>	13
2.1.3 <i>Corporate Governance</i>	19
2.1.3.1Ukuran Dewan Komisaris	23
2.1.3.2Proporsi Dewan Komisaris Independen	25
2.1.3.3Jumlah Rapat Dewan Komisaris.....	27
2.1.4 Variabel Kontrol.....	28
2.2 Penelitian Terdahulu	33
2.3 Kerangka Pemikiran	38
2.4 Hipotesis	40
BAB III METODE PENELITIAN	45

3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	45
3.2	Populasi dan Sampel	48
3.3	Jenis dan Sumber Data	48
3.4	Metode Pengumpulan Data	49
3.5	Metode Analisis Data	49
3.5.1	Uji Asumsi Klasik	49
3.5.3	Analisis Regresi Berganda	53
3.5.3	Pengujian Hipotesis	54
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian.....	57
4.2	Analisis Data.....	58
4.2.1	Statistik Deskriptif	58
4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	65
4.2.3	Pengujian Hipotesis	70
4.3	Interpretasi Hasil.....	74
BAB V	PENUTUP	82
5.1	Simpulan	82
5.2	Keterbatasan.....	83
5.3	Saran	84
	DAFTAR PUSTAKA	86
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	36
Tabel 4.1 Ringkasan Populasi dan Sampel Penelitian	57
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	58
Tabel 4.3 Prosentase Pengungkapan CSR	60
Tabel 4.4 Prosentase Pengungkapan CSR (per Aspek)	61
Tabel 4.5 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	67
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	68
Tabel 4.7 Hasil Uji F.....	70
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	71
Tabel 4.9 Hasil Uji t.....	72

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Diagram Legitimasi.....	12
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 4.1 Grafik Trend Pengungkapan CSR (%).....	63
Gambar 4.2 Grafik Histogram	66
Gambar 4.3 Grafik Normal P-P Plot of Regression Standarized Residual	66
Gambar 4.4 Scatterplot	69

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A : Daftar Kategori Pengungkapan CSR Versi GRI	91
Lampiran B : Pengungkapan CSR yang dilakukan Perusahaan.....	99
Lampiran C : Daftar Perusahaan Sampel.....	104
Lampiran D : Hasil Pengolahan Dengan SPSS 17.0.....	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanggung jawab sosial korporat atau *Corporate Social Responsibility* semakin banyak dibahas di dunia dengan berbagai cara. Perusahaan di dunia juga semakin banyak yang mengklaim bahwa mereka telah melakukan tanggung jawab sosialnya. Semakin maraknya pembahasan CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi praktek *Good Corporate Governance* (GCG), yang prinsipnya antara lain menyatakan perlunya perusahaan memperhatikan kepentingan *stakeholder*-nya sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholder* demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Menurut Gosslimh dan Vocht (2007), *corporate sosial responsibility* dapat dipandang sebagai kewajiban dunia bisnis untuk menjadi akuntabel terhadap seluruh *stakeholdernya* bukan hanya terhadap tujuan keuangan semata. Perusahaan dengan melaporkan pertanggungjawaban sosial sebagai aktifitas rutin maka akan membantu perusahaan dalam memastikan dan mempertahankan eksistensi jangka panjang.

Ide tanggung jawab sosial pada dasarnya adalah bagaimana perusahaan memberi perhatian kepada lingkungannya, terhadap dampak yang terjadi akibat kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan-perusahaan didunia kini memperhitungkan aspek dampak lingkungan dan sosial dalam menjalankan

operasi bisnis perusahaan untuk mempertahankan diri terhadap tekanan sosial melalui pengembangan program *Corporate Sosial Responsibility* atau CSR.

Keberadaan perusahaan mampu memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi. Tersedianya lapangan pekerjaan, menurunnya tingkat pengangguran, dan meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) Negara merupakan beberapa manfaat yang diperoleh dari adanya perusahaan. Perusahaan selain memberi dampak positif terhadap ekonomi, baik disadari atau tidak juga dapat memberikan dampak negatif terhadap sosial lingkungan. Beberapa perusahaan mendapat kritik karena telah menciptakan masalah sosial dan lingkungan, seperti polusi, penyusutan sumber daya alam, limbah, mutu dan keamanan produk yang tidak terjamin, hak dan status karyawan, keselamatan kerja dan lain-lain.

Perusahaan-perusahaan besar di Indonesia seperti Sampoerna, Indocement, Unilever, Aqua, Telkom, Aneka Tambang dan lain sebagainya telah melaksanakan CSR sebagai program rutin setiap tahunnya. Wujud CSR yang dilaksanakan rutin pun bervariasi, seperti beasiswa pendidikan, penanaman kembali (*replantation*), pemeliharaan lingkungan perumahan disekitar lingkungan pabrik, sampai penyediaan air bersih didaerah yang kekeringan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara bisnis dan masyarakat sangat erat.

Praktik pengungkapan CSR memainkan peranan penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup dilingkungan masyarakat dan kemungkinan aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Selain itu, penungkapan CSR

dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial yang ditimbulkan perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007).

Menurut Guthrie dan Matthews (1985) dalam Sembiring (2005), informasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) itu sendiri dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non keuangan berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, yang dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan terpisah.

Indonesian CSR Award yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia, merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada perusahaan yang telah memberikan kontribusi positif kepada sosial dan lingkungan masyarakat. Penghargaan tersebut merupakan langkah pemerintah untuk memicu kepedulian perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Keberadaan Indonesian CSR tidak lepas dari berlakunya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pengesahan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada tanggal 16 Agustus 2007, secara otomatis menggantikan UU Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995. Salah satu bentuk penyempurnaan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 adalah pembaharuan tentang konsep pengelolaan perseroan. Pendirian perseroan terbatas dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu kepentingan *shareholder* dan pemilik serta kepentingan masyarakat luas dalam hal ini adalah *stakeholder*.

Demi pemenuhan kepentingan *shareholder* dan *stakeholder* akan informasi dan manfaat sosial, UU No. 40 Tahun 2007 ini mengatur mengenai praktik dan pelaporan CSR. Pernyataan tersebut tercantum dalam Pasal 66 Ayat (2) Bagian C disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. Oleh karena itu, peneliti ingin memfokuskan penelitian kepada perusahaan yang kegiatan usaha utamanya atau *core business* berkaitan dengan sumber daya alam atau perusahaan pertambangan.

Perlakuan Undang-undang tersebut mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosialnya. Adanya standar yang diberlakukan terhadap praktek pelaporan CSR (*corporate social responsibility*) akan menjadikan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi *mandatory disclosure*, sehingga pelaporan CSR akan lebih lengkap dan akurat. Namun Undang-undang tersebut masih memiliki kelemahan, yaitu sektor apa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan CSR, sanksi yang dikenakan apabila melanggar, berapa besar anggaran minimum, serta format pelaporan CSR.

Tujuan dikeluarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selain meregulasi perusahaan mengenai CSR, yaitu untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan

yang baik atau biasa disebut *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Konsep GCG adalah konsep yang di dalamnya menyangkut struktur perseroan, yang terdiri dari unsur-unsur RUPS, direksi, dan komisaris, sehingga dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas kewenangan, dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan *shareholder* dan *stakeholder* (Asri, 2008).

Menurut Solomom (2007), *corporate governance* adalah suatu sistem *check and balance*, baik yang berasal dari dalam dan luar perusahaan, yang menjamin perusahaan untuk melaksanakan pertanggungjawaban kepada semua *stakeholder* dan bertindak sesuai dengan pertanggungjawaban sosial dimana perusahaan melakukan aktivitasnya. Pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan GCG adalah pengelolaan yang menerapkan prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan kewajaran (*fairness*). Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), prinsip-prinsip tersebut ditambah satu lagi, yaitu independensi (*independency*), yang selanjutnya kelima prinsip di atas tersebut “asas GCG”.

Perusahaan seharusnya melaporkan kinerja keuangan, sosial, dan lingkungannya kepada para *stakeholder*. Keberadaan dan implementasi konsep GCG, dapat memaksa manajerial untuk bertanggung jawab dalam memastikan sistem pengendalian, termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab sosial dan

lingkungan (Said *et al.*, 2009). Hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip GCG, yaitu *Responsibility* yang penekanannya diberikan kepada kepentingan *stakeholder* perusahaan. dari penjelasan tersebut, prinsip *Responsibility* dalam GCG melahirkan gagasan CSR atau peran serta perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya.

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia secara jelas menyatakan salah satu tujuan diterapkannya pedoman ini adalah untuk tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu menjadi acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan GCG dalam rangka mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan (KNKG, 2006). Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang terkait antara *corporate governance* dengan *corporate sosial responsibility*.

Hubungan antara *corporate governance* dan pengungkapan *corporate sosial responsibility* sudah pernah diteliti oleh Saih *et al.* (2009), yang penelitiannya dilakukan di Malaysia dengan menggunakan pengertian pengungkapan CSR oleh Hackston dan Milne (1996). Pengungkapan sosial dapat diartikan sebagai penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang berhubungan dengan interaksi antara perusahaan dengan lingkungan fisik dan sosialnya, yang dilaporkan dalam *annual report* atau laporan yang terpisah. Pengungkapan tanggung jawab sosial tersebut mencakup lingkungan fisik, energi, sumber daya manusia, produk, dan keterlibatan masyarakat (Hackston dan Milne, 1996).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian dimaksudkan untuk meneliti hubungan *corporate governance* dengan *corporate social responsibility*. *Corporate governance* merupakan alat pengawasan terhadap kinerja perusahaan, dengan adanya CG maka dapat mempengaruhi dari tingkat pelaporan CSR perusahaan. CSR perusahaan dilakukan sebagai tindakan jangka panjang perusahaan. Oleh karena itu, adanya CG membantu konsistensi dari tindakan CSR perusahaan.

Disebutkan diatas pada isi UU. No 40 pasal 74, bahwa perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, peneliti ingin memfokuskan objek penelitian kepada perusahaan yang kegiatan usahanya atau *core business* berkaitan dengan sumberdaya alam atau pertambangan terutama yang ada dan melakukan operasional di Indonesia, karena perusahaan pertambangan memiliki andil cukup besar dalam kerusakan lingkungan, baik sebelum maupun setelah melakukan eksploitasi.

1.2 Rumusan Masalah

Implementasi GCG dapat mendorong perusahaan untuk melaksanakan *corporate social responsibility*, karena adanya salah satu prinsip GCG yaitu *Responsibility*, yang penekanannya diberikan kepada kepentingan *stakeholder* perusahaan. Prinsip *responsibility* dalam GCG melahirkan gagasan CSR atau peran serta perusahaan dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab social perusahaan tidak hanya ditujukan kepada pemegang saham dan kreditur, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan

lingkungannya. Praktik pengungkapan *corporate social responsibility* memiliki peran penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan kemungkinan aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian, pengungkapan tanggung jawab social merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
3. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh elemen dari *corporate governance* yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan jumlah rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Hasil penelitian diharapkan dapat:

1. Memberikan pemahaman mengenai elemen *corporate governance* dan pengaruhnya terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2. Bagi perusahaan, dapat memberikan pemikiran tentang pentingnya pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan dan sebagai pertimbangan dalam penerapan GCG.
3. Bagi badan pembuat standard pemerintah selaku *regulator*, seperti Bapepam, IAI, Komite Nasional Kebijakan Governance, dan sebagainya, sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas standard peraturan yang sudah ada.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan berisi latar belakang mendasari munculnya masalah dalam penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian. Bagian ini terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir penelitian, dan pengembangan hipotesis.

Bab III metode penelitian berisi tentang variabel penelitian, definisi operasional, penentuan sampel, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis sampel.

Bab IV hasil dan pembahasan akan diuraikan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis, dan interpretasi hasil penelitian.

Bab V penutup akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Legitimasi

Menurut Ghozali dan Chariri (2007), yang melandasi teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.

Definisi legitimasi oleh Lindbolm (1994, hal 2) dalam Deegan (2002) adalah sebagai berikut :

“...sebuah kondisi atau situasi yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas dimana masyarakat menjadi bagiannya. Ketika suatu perbedaan, baik yang nyata atau potensial ada di antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan muncul ancaman terhadap legitimasi perusahaan.”

Postulat dari teori legitimasi adalah organisasi bukan hanya harus terlihat memperlihatkan hak-hak investor namun juga secara umum juga harus memperlihatkan hak-hak publik (Deegan dan Rankin, 1996).

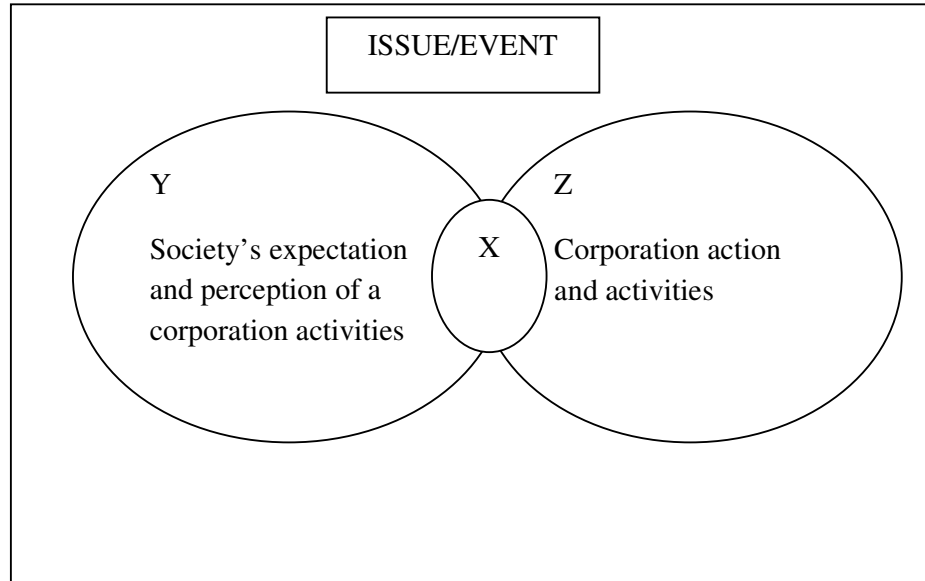
Apabila perusahaan melakukan pengungkapan sosial, maka perusahaan merasa keberadaan dan aktifitasnya akan mendapat “status” dari masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi atau dapat dikatakan terlegitimasi. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Cormier dan Gordon (2001) dalam Inawesnia (2008) yang menyatakan bahwa, teori legitimasi berdasar

pada konsep bahwa organisasi memiliki kontrak dengan masyarakat dan memenuhi kontrak tersebut dapat melegitimasi organisasi dan aktifitasnya. Secara jelas, konsep tersebut menganggap bahwa kelangsungan organisasi akan terancam jika masyarakat menganggap kontrak sosial organisasi dengan masyarakat telah dilanggar.

Ketika manajer merasa bahwa operasi perusahaan tidak sesuai lagi dengan kontrak sosial, maka upaya perbaikan perlu dilakukan agar perusahaan tetap memiliki “kontrak” tersebut, dengan cara mengubah persepsi dan pandangan dari masyarakat. Pengungkapan merupakan cara yang tepat untuk mengubah persepsi dan pandangan-pandangan tersebut. Dengan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi (Mahdiyah, 2008).

Legitimasi diberikan oleh masyarakat untuk perusahaan, namun legitimasi dapat dikendalikan oleh perusahaan itu sendiri). Hal ini mengindikasikan bahwa perubahan-perubahan dalam norma dan nilai sosial adalah salah satu motivasi untuk perubahan organisasi dan juga sumber tekanan untuk legitimasi organisasi (O'Donovan, 2002).

GAMBAR 2.1
DIAGRAM LEGITIMASI



Sumber : O'Donovan (2002)

Gambar 2.1 mengadopsi perspektif bahwa ancaman atau legitimasi potensial berasal dari asosiasi negatif perusahaan dengan isu atau kejadian (Brown dan Deegan, 1999; Nasi *et al.*, 1997 dalam O'Donovan, 2002). Daerah yang ditandai dengan huuf X dalam gambar diatas menggambarkan keselarasan antar aktivitas perusahaan dan ekspektasi masyarakat terhadap perusahaan dan aktivitasnya berdasar pada nilai-nilai dan norma sosial. Daerah Y dan Z menggambarkan ketidakselarasan antara tindakan-tindakan perusahaan dengan persepsi masyarakat. Tujuan perusahaan adalah untuk menjadi sah, untuk memastikan daerah X dapat seluas mungkin dengan mengurangi kesenjangan legitimasi. Beberapa taktik legitimasi dan pendekatan pengungkapan dapat diadopsi untuk mengurangi kesenjangan legitimasi. Status legitimasi perusahaan

mungkin sulit untuk ditetapkan, karena legitimasi perusahaan adalah berdasar pada persepsi dan nilai sosial yang dapat berubah sewaktu-waktu (O'Donovan, 2002).

Dalam mempertimbangkan strategi organisasi dalam mempertahankan atau menciptakan keselarasan antar nilai sosial yang diartikan perusahaan dengan nilai-nilai yang diterima masyarakat. Literatur yang selalu digunakan adalah Dowling dan Pfeffer (1975, hal. 127) dan Lindblom (1994), (O'Donovan, 2002). Dowling dan Pfeffer (1975, hal. 127) dalam Deegan (2002) menjelaskan bahwa ketika organisasi bertemu dengan ancaman legitimasi, maka organisasi dapat melegitimasi aktivitas-aktivitasnya dengan jalan:

1. Organisasi dapat menyesuaikan *output*, tujuan dan metode-metode operasinya agar sesuai dengan definisi legitimasi yang berlaku.
2. Organisasi dapat berusaha lewat komunikasi, untuk mengubah definisi legitimasi sosial sehingga hal tersebut sesuai dengan praktik-praktik, *output*, dan nilai-nilai organisasi saat ini;
3. Organisasi dapat berusaha lewat komunikasi untuk dikenali lewat simbol-simbol, nilai-nilai atau institusi yang memiliki dasar legitimasi kuat.

2.1.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*)

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate sosial responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholder*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004 dalam Anggraini, 2006).

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

mendefinisikan CSR sebagai:

“Business’s contribution to sustainable development and that corporate behavior must be but only ensure returns to shareholders, wages to employees, and products and services to consumers, but they must respond to societal and environmental concerns and value.”

Definisi di atas menjelaskan CSR sebagai kontribusi perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan serta perilaku perusahaan (korporat) yang tidak semata-mata menjamin adanya *return* bagi para pemegang saham, upah bagi para karyawan, produk serta jasa bagi para pelanggan, melainkan perusahaan juga harus memberikan perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai masyarakat.

Dalam Draft ISO 26000, 2007, *Guidance on Social Responsibility*, CSR didefinisikan sebagai tanggung jawab dari suatu organisasi untuk dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan aktivitas di masyarakat dan lingkungan melalui transparansi dan perilaku etis yang konsisten dengan perkembangan berkelanjutan dan kesejahteraan dari masyarakat; pertimbangan harapan *stakeholder*; sesuai dengan ketentuan hukum yang bisa diterapkan dan norma-norma internasional yang konsisten dari perilaku; dan terintegrasi sepanjang organisasi.

Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. Tanggung jawab sosial didefinisikan sebagai kewajiban organisasi yang tidak hanya menyediakan barang dan jasa yang baik bagi masyarakat, tetapi juga menjaga kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup maupun lingkungan sosial, serta

adanya kontribusi positif yang diberikan terhadap komunitas/masyarakat dimana perusahaan berada.

Penerapan CSR dalam perusahaan-perusahaan diharapkan selain memiliki komitmen finansial kepada pemilik atau pemegang saham (*shareholder*), tapi juga memiliki komitmen sosial terhadap para pihak lain yang berkepentingan, karena CSR merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang (Rosmasita, 2007).

Menurut Rosmasita (2007), tujuan CSR adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankan, biasanya secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik.
2. Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Keberatan kontrak sosial ini menuntut dibebaskannya akuntabilitas sosial.
3. Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor.

World bank (bank dunia) mendefinisikan CSR sebagai:

“CSR is commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve quality of live, in ways that are both good for business and good for development”.

Definisi menjelaskan CSR merupakan suatu komitmen bisnis untuk berperan dalam pembangunan ekonomi yang dapat bekerja dengan karyawan dan perwakilan mereka, masyarakat sekitar dan masyarakat yang lebih luas untuk

memperbaiki kualitas hidup, dengan cara yang baik bagi bisnis maupun pengembangan.

Definisi CSR menurut versi Uni Eropa adalah sebagai berikut:

“CSE is concept whereby companies integrate sosial and environmental concern in their business operations and their interaction with a their stakeholders on a voluntary basis”.

Definisi di atas merupakan salah satu definisi yang menggambarkan bahwa praktik CSR berhubungan dengan interaksi perusahaan dan *stakeholder* dengan dasar sukarela.

Pengungkapan tanggung jawab sosial atau sering disebut sebagai *Corporate Sosial Reporting* adalah proses pengkomunikasian efek-efek sosial dan lingkungan atas tindakan-tindakan ekonomi perusahaan pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dan pada masyarakat secara keseluruhan (Rosmasita, 2007). Kontribusi negatif perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya telah menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat, Oleh karena itu dengan mengungkapkan informasi-informasi mengenai operasi perusahaan sehubungan dengan lingkungan sebagai tanggung jawab perusahaan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat. Jadi agar bentuk tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan dapat diketahui oleh berbagai pihak yang berkepentingan, maka hal itu diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Hal serupa disampaikan oleh Darwin (2007) dikutip dalam Machmud dan Djakman (2008) bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan *stakeholder* lainnya tentang bagaimana perusahaan telah

mengintegrasikan kepedulian dan tanggung jawab sosial (CSR) dalam setiap aspek kegiatan operasinya. Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas, dan transparansi perusahaan kepada investor dan *stakeholder* lainnya. Laporan tahunan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh manajemen untuk melakukan pengungkapan dan pertanggungjawaban kinerja perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat. Para pengguna laporan tahunan seperti analis, investor, masyarakat dan lainnya membutuhkan informasi yang lengkap mengenai laporan tentang suatu perusahaan, sehingga pengungkapan yang lebih rinci mengenai perusahaan akan sangat penting dan bermanfaat untuk melakukan penilaian dan analisis pengambilan keputusan yang akan mereka lakukan.

Menurut Kotler dan Lee (2005) menyebutkan bahwa perusahaan akan terdorong untuk melakukan praktik dan pengungkapan CSR, karena memperoleh beberapa manfaat seperti peningkatan penjualan dan *market share*, memperkuat *brand positioning*, meningkatkan citra perusahaan, menurunkan biaya operasi, serta meningkatkan daya tarik perusahaan di mata investor dan analis keuangan.

Menurut Taridi (2009) ada beberapa manfaat dari praktik dan pengungkapan CSR bagi perusahaan, antara lain:

1. Pengelolaan sumber daya korporasi secara amanah dan bertanggung jawab, yang akan meningkatkan kinerja korporasi secara *sustainable*.
2. Perbaikan citra korporasi sebagai agen ekonomi yang bertanggung jawab (*good corporate citizen*) sehingga meningkatkan nilai perusahaan.

3. Peningkatan keyakinan investor terhadap korporasi sehingga menjadi lebih atraktif sebagai target investasi.
4. Memudahkan akses terhadap investasi domestik dan asing.
5. Melindungi direksi dan dewan komisaris dari tuntutan hukum.

Kewajiban pengungkapan CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain adalah pernyataan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang menyarankan kepada perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab mengenai sosial dan lingkungan, sebagaimana dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 1998) Paragraf kesembilan:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industry dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industry yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Hendriksen (1991;203) mendefinisikan pengungkapan sebagai penyajian sejumlah informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara optimal pasar modal yang efisien. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*), yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku.

Menurut Elkington (1997) dalam Solihin (2009), salah satu model awal bagi perusahaan dalam menyusun *sustainability report* adalah dengan menggunakan konsep *triple bottom line*. Konsep *triple bottom line* memperhatikan

tiga aspek, yakni dampak operasi perusahaan terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan.

Saat ini *sustainability report* perusahaan-perusahaan hampir di seluruh dunia disusun dengan menggunakan standar pelaporan yang diusulkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*). GRI dalam standar pelaporannya memperhatikan tiga indikator/ aspek, yaitu indikator ekonomi atau keuangan (*economic performance indicators*), indikator lingkungan (*environment performance indicator*), dan indikator sosial (*social performance indicators*). Indikator sosial terdiri dari empat indikator, yaitu hak asasi manusia (*human rights performance indicators*), masyarakat (*society performance indicators*), tenaga kerja (*labor performance indicators*), dan pertanggungjawaban produk (*product responsibility performance indicators*).

2.1.3 Corporate Governance

Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal dengan “*Cadbury Report*” (Tjoger dkk, 2003 dalam Suprayitni, 2004). Laporan ini dipandang sebagai titik tolak (*turning point*) yang sangat menentukan praktik CG diseluruh dunia. Cadbury Committee mendefinisikan *corporate governance* sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan

perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.

Malaysian High Level Committee mendefinisikan *good corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan pihak-pihak lain. Pengertian CG menurut S.K Menteri Negara/Kepala Badan/Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN no.23/M-PM BUMN/2000 tentang pengembangan praktek *good corporate governance* dalam perusahaan perseroan (PERSERO). GCG adalah prinsip korporasi yang perlu diharapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Good Corporate governance terjemahan bebasnya adalah tata kelola perusahaan yang baik. Arti lain GCG adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat lain.

Suprayitno (2004) menyebutkan bahwa *corporate governance* merupakan hubungan antara *stakeholder* yang digunakan untuk menentukan dan mengendalikan arah strategi dan kinerja suatu organisasi.

Organization economic corporation and development (OECD, 2004) telah mengembangkan seperangkat prinsip *corporate governance* yang diterapkan sesuai dengan kondisi diberbagai negara. Prinsip dasar tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, kewajaran dan responsibilitas yang mencakup lima aspek, yaitu : hak pemegang saham, perlakuan adil terhadap seluruh pemegang saham, peranan *stakeholder* dalam *corporate governance*, keterbukaan dan transparansi, *board of directors* dalam perusahaan.

Prinsip *corporate governance* diatas digunakan untuk mengukur seberapa jauh penerapan *corporate governance* dalam suatu perusahaan :

- Transparansi

Transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung pada kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator yang sama.

- Akuntabilitas

Akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara organ-organ yang ada didalam perusahaan. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *agency problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Oleh karena itu, akuntailitas dapat diterapkan dengan mendorong seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang dan hak-kewajiban.

- Kewajaran

Prinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing serta perlakuan yang setara terhadap semua investor. Praktik kewajaran ini juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan seret penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dari praktik kecurangan (*fraud*) dan praktik-praktik "*insider trading*".

- Responsibilitas

Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam *corporate governance* yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya.

Menurut *The Forum of Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), kegunaan dari *corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. Lebih mudah memperoleh modal
2. Biaya modal (*cost of capital*) yang lebih rendah
3. Memperbaiki kinerja usaha
4. Mempengaruhi harga saham
5. Memperbaiki kinerja ekonomi.

Nugroho (2008) menyatakan tujuan dan manfaat *good corporate governance* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil, agar
2. Kompetitif serta mendorong investasi,
3. Mendorong pengelolaan perseroan secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, dewan direksi dan RUPS,
4. Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota dewan direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) maupun kelestarian lingkungan disekitar perseroan.

2.1.3.1 Ukuran Dewan Komisaris

Dalam keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara KEP-117/M-MBU/2002 Pasal 1 point b, dewan komisaris merupakan salah satu organ perusahaan. sebagai organ perusahaan, dewan komisaris bertugas mengawasi kegiatan perusahaan dan harus memantau efektifitas praktik *corporate governance* perusahaan. Komposisi anggota dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif tepat dan cepat serta dapat bertindak independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang

dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis (KEP-117/M-MBU/2002 Pasal 16 ayat 1).

Selain itu komisaris harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset perusahaan. Berbagai faktor yang membentuk lingkungan pengendalian mencakup beberapa hal, antara lain :

- a. Nilai integritas dan etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Dewan komisaris dan komite audit;
- d. Filosofi dan gaya operasi manajemen;
- e. Struktur organisasi;
- f. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab; dan
- g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia (Mulyani, 2002).

Berdasarkan hal tersebut, keberadaan dewan komisaris dan komposisi dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang penting dalam pelaksanaan praktik *good corporate governance* untuk peningkatan nilai perusahaan.

Antara perusahaan satu dengan yang lainnya tentunya memiliki jumlah anggota dewan yang berbeda-beda. Jumlah anggota dewan atau ukuran dewan, harus disesuaikan dengan kepentingan, ukuran, dan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan (Mizrawati, 2009).

Ukuran dewan yang besar dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi perusahaan. Keuntungan dari ukuran dewan yang besar dalam suatu

perusahaan yaitu dapat mengelola sumber dayanya dengan lebih baik (Fitdini, 2009). Pertukaran keahlian, pikiran, dan informasi dalam dewan juga akan lebih luas dan bervariasi. Semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah besar akan semakin tinggi pula (Fitdini, 2009). Sedangkan kerugian dari ukuran dewan yang besar adalah dapat meningkatkan permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi. Permasalahan tersebut dapat menurunkan kemampuan dewan untuk mengendalikan dan mengawasi manajemen, sehingga dapat menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan kontrol (Fitdini, 2009). Dengan kata lain, ukuran dewan yang terlalu besar juga dapat meningkatkan biaya agensi dalam perusahaan.

2.1.3.2 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan GCG. Pembentukan dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang banyak digunakan untuk memonitor manajer dan karenanya menggambarkan puncak dari sistem pengendalian pada perusahaan besar, yang memiliki peran ganda yaitu untuk memonitor dan sebagai pengesahan (*ratification*) agar pelaksanaan ratifikasi efektif. Dewan komisaris melihatkan manajer internal dengan keahlian tertentu. Sedangkan agar pelaksanaan pengawasan efektif maka dewan komisaris memasukkan anggota manajemen dari luar yang independen. Namun demikian seringkali komisaris tersebut belum bisa melaksanakan fungsi pengendalian terhadap direksi dengan baik, salah satu sebabnya adalah banyak perusahaan di Indonesia yang masih

dikendalikan oleh pemegang saham pengendalian sehingga dewan komisaris gagal untuk memiliki kepentingan *stakeholdernya*, selain daripada pemegang saham mayoritas (Sabarto Zarini dalam Kusuma dan Susanto, 2004). Kedua, pengawasan dewan komisaris terhadap manajemen pada umumnya tidak efektif. Ini terjadi karena proses pemilihan dewan komisaris sering dipilih oleh manajemen sehingga setelah dipilih manajemen tidak berani member kritik kepada manajemen (Mace dalam Kusuma dan Susanto, 2004).

Untuk manajemen pelaksanaan GCG maka diperlukan komisaris independen serta tidak memiliki hubungan bisnis (kontraktual) ataupun hubungan lainnya dengan pemegang saham mayoritas dan diluar direksi (manajemen) baik secara langsung maupun tidak langsung (Kusuma dan Susanto, 2004). Komisaris independen memikul tanggung jawab untuk mendorong serta proaktif agar komisaris sebagai pengawas dan penasehat direksi dapat melaksanakan tugas antara lain :

- a. Memastikan perusahaan-perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif;
- b. Memastikan perusahaan memiliki eksekutif dan manajer yang professional;
- c. Memastikan perusahaan memiliki informasi, sistem pengendalian dan sistem audit yang bekerja dengan baik;
- d. Memastikan perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, maupun nilai-nilai yang diterapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya;

- e. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik;
- f. Memastikan prinsip dan praktek GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik (Kusuma dan Susanto, 2004).

Dalam kinerjanya, komisaris independen dipandang dapat menambah kualitas aktivitas pengawasan oleh dewan komisaris. Hal ini dimotivasi oleh dua hal. Pertama adalah komisaris independen cenderung lebih mengutamakan reputasinya sendiri (Subramaniam, *et al.*, 2009). Oleh karena itu untuk melindungi reputasinya, mereka berusaha menuntut perusahaan untuk melaksanakan pengawasan yang optimal dan mengimplementasikan praktek *good corporate governance*. Yang kedua, komisaris independen cenderung tidak tergantung pada kondisi ekonomi perusahaan. Mereka merupakan keterwakilan independen dan objektivitas dari kepentingan *shareholder*, karena mereka tidak terafiliasi dengan perusahaan sebagai pegawai (Pincus, *et al.*, 1989 dalam Subramaniam, *et al.*, 2009; Spira dan Bender, 2004). Oleh karena itu, mereka lebih menekankan pada keefektivan proses pengawasan yang dilakukannya dibandingkan dengan pertimbangan kondisi ekonomi perusahaan.

2.1.3.3 Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Menurut Egon Zehnder dikutip dalam Booklet FCGI (2002) menyatakan bahwa, Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dalam rangka menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris

mengadakan rapat-rapat rutin untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dewan Direksi dan implementasinya.

Rapat dewan komisaris merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam pengambilan suatu keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Dalam rapat dewan komisaris (*board process*) terhadap beberapa suara yang akan diambil menjadi suatu keputusan bulat dengan musyawarah mufakat. Proses pengambilan keputusan ini merupakan hal yang penting dalam menentukan efektivitas dewan komisaris dalam melakukan mekanisme pengawasan dan pengendalian (Muntoro, 2006). Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi diantara anggota-anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut akan membahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, mengatasi masalah benturan kepentingan (FCGI, 2002). Oleh karena itu, dengan semakin sering dewan komisaris mengadakan pertemuan, diharapkan mekanisme pengawasan perusahaan dapat dilakukan dengan baik.

2.1.4 Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan *Leverage*

2.1.4.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan (*size*) merupakan salah satu variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan mengenai variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Terdapat beberapa penjelasan mengenai pengaruh ukuran perusahaan (*size*) terhadap kualitas pengungkapan. Hal ini dapat dilihat dari

berbagai penelitian empiris yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh total aktiva hampir selalu konsisten dan secara statistik signifikan. Beberapa penjelasan yang mungkin dapat menjelaskan fenomena ini adalah bahwa perusahaan besar mempunyai biaya informasi yang rendah, perusahaan besar juga mempunyai kompleksitas dan dasar pemilikan yang lebih luas dibanding perusahaan kecil (Cooke, 1989 dalam Rosmasita, 2007).

Size perusahaan merupakan variabel independen yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan. Perusahaan besar merupakan entitas bisnis yang banyak disoroti, pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial. Akan tetapi, tidak semua penelitian mendukung hubungan antara *size* perusahaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan. penelitian yang tidak berhasil menunjukkan hubungan kedua variabel ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Robert (1992) dalam Sembiring (2005), sedangkan penelitian yang berhasil menunjukkan hubungan kedua variabel ini antara lain Hackston dan Milne (1996), Hasibuan (2001), Angraini (2006), Amran dan Devi (2008), Sembiring (2005).

Banyak bukti dari penelitian sebelumnya telah mendukung adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan luas pengungkapan sukarela (Cooke, 1989; Wallace *et al.*, 1994; Suropto, 1999. Alsaeed, 2006). Variabel ukuran perusahaan merupakan variabel yang secara konsisten berhubungan positif terhadap pengungkapan sukarela pada penelitian-penelitian terdahulu.

Perusahaan-perusahaan besar cenderung mengungkapkan informasi dalam jumlah yang lebih banyak karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Perusahaan-perusahaan ini lebih terekspos publik untuk diselidiki dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil, karena mereka cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi.
2. Mengungkapkan lebih banyak informasi membuat perusahaan besar memperoleh dana baru dengan biaya yang lebih rendah.
3. Perusahaan besar memiliki sumber daya yang cukup untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan jumlah data yang besar pada biaya minimal. Perusahaan besar lebih mungkin merekrut karyawan dengan keterampilan tinggi yang diperlukan untuk menerapkan system pelaporan manajemen yang canggih sehingga dapat mengungkapkan informasi yang lebih luas (Suripto, 1999).
4. Biaya agensi lebih tinggi untuk perusahaan besar karena pemegang saham tersebar luas, karenanya pengungkapan tambahan membantu mengurangi biaya agensi yang potensial (Watts dan Jimmerman, 1983 dalam Alsaeed, 2006).
5. Pada umumnya perusahaan besar memiliki beragam produk dan beroperasi diberbagai wilayah, termasuk luar negeri sehingga perusahaan besar lebih banyak melakukan pengungkapan sukarela dibandingkan dengan perusahaan kecil.

2.1.4.2 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Menurut Heinze (1976); Gray *et al.* (1995b); dalam Sembiring (2005) profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan CSR kepada pemegang saham. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosialnya. Hackston dan Milne (1996) dalam penelitiannya menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial.

Hubungan antara kinerja keuangan suatu perusahaan, dalam hal ini profitabilitas, dengan pengungkapan tanggung jawab sosial menurut Belkaoui dan Karpik (1989) paling baik diekspresikan dengan pandangan bahwa tanggapan sosial yang diminta dari manajemen sama dengan kemampuan yang diminta untuk membuat suatu perusahaan memperoleh laba. Manajemen yang sadar dan memperhatikan masalah sosial juga akan memajukan kemampuan yang diperlukan untuk menggerakkan kinerja keuangan perusahaan. Konsekuensinya, perusahaan yang mempunyai respon sosial dalam hubungannya dengan pengungkapan tanggung jawab sosial seharusnya menyingkirkan seseorang tidak merespon hubungan antara profitabilitas perusahaan dengan variabel akuntansi seperti tingkat pengembalian investasi dan variabel pasar.

2.1.4.3 *Leverage*

Leverage berfungsi untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio *leverage* merupakan rasio pengungkit yang menggunakan uang pinjaman (*debt*) untuk memperoleh keuntungan (Ang, 1997).

Rasio *leverage* menunjukkan seberapa besar sebuah perusahaan menggunakan hutang dari luar untuk membiayai operasinya. Rasio ini dihitung dengan membandingkan hutang dengan aset yang dimiliki perusahaan. Semakin rendah rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan semakin baik kondisinya. Sebaliknya, semakin tinggi *leverage*, kondisi perusahaan akan semakin buruk.

Rasio *leverage* merupakan tingkat penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan perusahaan (Weston dan Copeland, 1995). Rasio *leverage* ini akan selalu menjadi perhatian bagi auditor, karena apabila rasio *leverage* tinggi akan terdapat keraguan substansial bahwa perusahaan dapat melangsungkan usahanya. Semakin tinggi rasio *leverage* mencerminkan semakin tingginya risiko keuangan perusahaan. Risiko keuangan perusahaan yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan sedang mengalami suatu kesulitan keuangan. Rasio *leverage* perusahaan yang tinggi akan memaksa perusahaan untuk berusaha semaksimal mungkin meningkatkan labanya agar mampu membiayai hutang-hutangnya (Setyarno, dkk. 2006).

Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa semakin tinggi rasio *leverage*, maka akan dibutuhkan biaya *monitoring* yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan biaya agensi yang ditanggung perusahaan cenderung lebih tinggi,

terkait dengan tingginya transfer kekayaan dari *debtholder* kepada manajer (Firth dan Rui, 2006; Chen, *et al.*, 2009).

2.2 Penelitian Terdahulu

Said *et al.* (2009) melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara karakteristik *corporate governance* dan pengungkapan CSR pada perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Malaysia. Said *et al.* menggunakan *annual report* dan *website* perusahaan untuk menganalisis pengungkapan CSR. Tema yang dianalisis adalah lingkungan, komunitas, sumber daya manusia, energi, dan produk. Sampel dalam penelitian ini adalah 150 perusahaan yang terdaftar di KLSE pada tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah, konsentrasi kepemilikan, dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Variabel yang paling berpengaruh adalah kepemilikan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005) berusaha meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada perusahaan di Indonesia. Variabel independen yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, profil perusahaan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan *leverage* perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan, profil perusahaan, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan di Indonesia.

Akhtaruddin *et al.* (2009) meneliti hubungan antara *corporate governance* dan pengungkapan sukarela di Malaysia. Aspek *corporate governance* yang digunakan adalah ukuran dewan, independensi dewan, kepemilikan publik, *family*

control, dan komite audit. Sampel yang diambil adalah 105 perusahaan dari 6 sektor yang terdaftar di KLSE. Indeks pengungkapan yang digunakan adalah indeks yang dikembangkan oleh Chau dan Gray (2002), Ho dan Wong (2001), dan Ferguson, Lam dan Lee (2002). Hasil penelitian Akhtaruddin *et al.* (2009) menunjukkan bahwa ukuran dewan berhubungan dengan tingkat pengungkapan sukarela, namun ukuran komite audit tidak berhubungan dengan pengungkapan sukarela. Independensi dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela, independensi dewan membuat perusahaan semakin transparan sedangkan *family control* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela, hal ini mengindikasikan apabila perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga (*family*) menjadi kurang transparan dan lebih konservatif dalam menerbitkan informasi.

Rosmasita (2007) berusaha mempersempit objek dari penelitian sebelumnya dengan melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR suatu perusahaan dalam hal ini hanya pada perusahaan manufaktur. Faktor-faktor tersebut diproksikan dalam kepemilikan manajemen, *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Sampel yang digunakan adalah 113 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2004-2005. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: (1) pengujian secara simultan menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor perusahaan terhadap pengungkapan CSR perusahaan, (2) variabel kepemilikan manajemen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006) bertujuan untuk mengamati tingkat pengungkapan akuntansi CSR dan menguji faktor-faktor penentu yang digunakan perusahaan sebagai pertimbangan untuk mengungkapkan akuntansi CSR. Data penelitian ini adalah semua sektor perusahaan yang listing di BEI tahun 2000-2004. Anggraini menggunakan kategori pelaporan kelastarian perusahaan (*corporate sustainability reporting*) dari Darwin (2004), antara lain kinerja lingkungan, kinerja ekonomi, dan kinerja sosial. Hasilnya terdapat lima faktor yang dapat dipertimbangkan perusahaan dalam mengungkapkan CSR, yaitu faktor kepemilikan manajemen, hutang, ukuran perusahaan, tipe perusahaan dan profitabilitas. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa hampir semua perusahaan melaporkan kinerja ekonomi karena sudah diterapkan dalam PSAK 57. Kepemilikan manajemen dan jenis industry menjadi bahan pertimbangan oleh perusahaan.

Huafang dan Jianguo (2007) melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh antara struktur kepemilikan dan komposisi dewan terhadap pengungkapan sosial pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Cina. Sampel penelitian ini 559 perusahaan, perusahaan tersebut yang terdaftar di SSE Cina, namun perusahaan bergerak disektor financial tidak termasuk di dalam sampel. Pengungkapan sukarela dilihat dari *annual report* perusahaan, dan diukur dengan menggunakan daftar pengungkapan (*disclosure lists*) yang dimodifikasi dari Botosan (1997). Daftar ini terdiri dari 30 items yang terdiri dari informasi latar belakang (contoh: tujuan, strategi, dan kompetisi perusahaan), informasi bisnis (contoh: penjualan, produk, dan perkiraan laba), informasi financial (contoh:

rasio-rasio dan tingkat perputaran), dan informasi non-finansial (contoh: pelatihan staf, ISO, dan budaya perusahaan). Kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, dan *legal-person ownership* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Sedangkan CEO *duality* dan komposisi dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Alat Analisis	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Said <i>et al.</i> (2009)	Regresi Berganda (<i>multiple Regression</i>)	Variabel Independen: Ukuran dewan, <i>independent directors</i> , CEO <i>duality</i> , komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah.	Kepemilikan pemerintah, konsentrasi kepemilikan, dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan CSR. Variabel yang paling berpengaruh adalah kepemilikan pemerintah. Proporsi anggota independen pada komite audit akan memperluas pengungkapan CSR.
Angraini (2006)	Regresi Berganda (<i>Multiple Regression</i>)	Variable independen : kepemilikan manajemen, Leverage, ukuran perusahaan, tipe industry. Variabel dependen : CSR Disclosure	Hasil penelitian menunjukan bahwa hamper semua perusahaan mengungkapkan kinerja ekonomi. Kepemilikan manajemen dan tipe industry menjadi bahan pertimbangan untuk pengungkapan CSR.

Sembiring (2005)	Regresi Berganda (<i>multiple regression</i>)	Variabel independen: Ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>industry profile</i> , ukuran dewan komisaris, dan <i>leverage</i> . Variabel dependen: Pengungkapan CSR.	Secara simultan, variabel-variabel independen (ukuran perusahaan, profitabilitas, <i>industry profile</i> , ukuran dewan komisaris, dan <i>leverage</i>) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR. Secara parsial, hanya variabel ukuran perusahaan, <i>industry profile</i> , dan ukuran dewan komisaris yang berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.
Akhtaruddin <i>et al.</i> (2009)	OLS <i>regression</i>	Variabel Independen: Ukuran dewan, independensi dewan, kepemilikan publik, <i>family control</i> , dan komite audit. Variabel Dependen: Pengungkapan sukarela.	Ukuran dewan berhubungan dengan tingkat pengungkapan sukarela, namun komite audit tidak berhubungan dengan pengungkapan sukarela. Independensi dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela, independensi dewan membuat perusahaan semakin transparan, sedangkan <i>family control</i> berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela, hal ini mengindikasikan apabila perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga (<i>family</i>) menjadi kurang transparan dan lebih konservatif dalam menerbitkan informasi.
Rosmasita (2007)	Regresi Berganda (<i>multiple regression</i>)	Variabel Independen: Kepemilikan manajemen, tingkat <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Variabel Dependen:	(1) Pengujian secara simultan menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor perusahaan terhadap pengungkapan CSR perusahaan. (2) variabel kepemilikan manajemen

		Pengungkapan sosial.	mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sosial.
Huafang dan Jianguo (2007)	Regresi Berganda (<i>Multiple Regression</i>)	Variabel independen : <i>Blockholder ownership</i> , kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah, <i>legal person ownership</i> , <i>CEO duality</i> , dan komisaris independen. Variable dependen : Luas pengungkapan sukarela	Kepemilikan manajerial dan kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sukarela. <i>Blockholder ownership</i> , kepemilikan asing dan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.
Rizky Mulia (2010)	Regresi Berganda	Variabel Independen : Ukuran dewan komisaris, komisaris independen, independensi komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah. Variabel dependen : Luas pengungkapan CSR.	Independensi komite audit dan Kepemilikan pemerintah yang berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

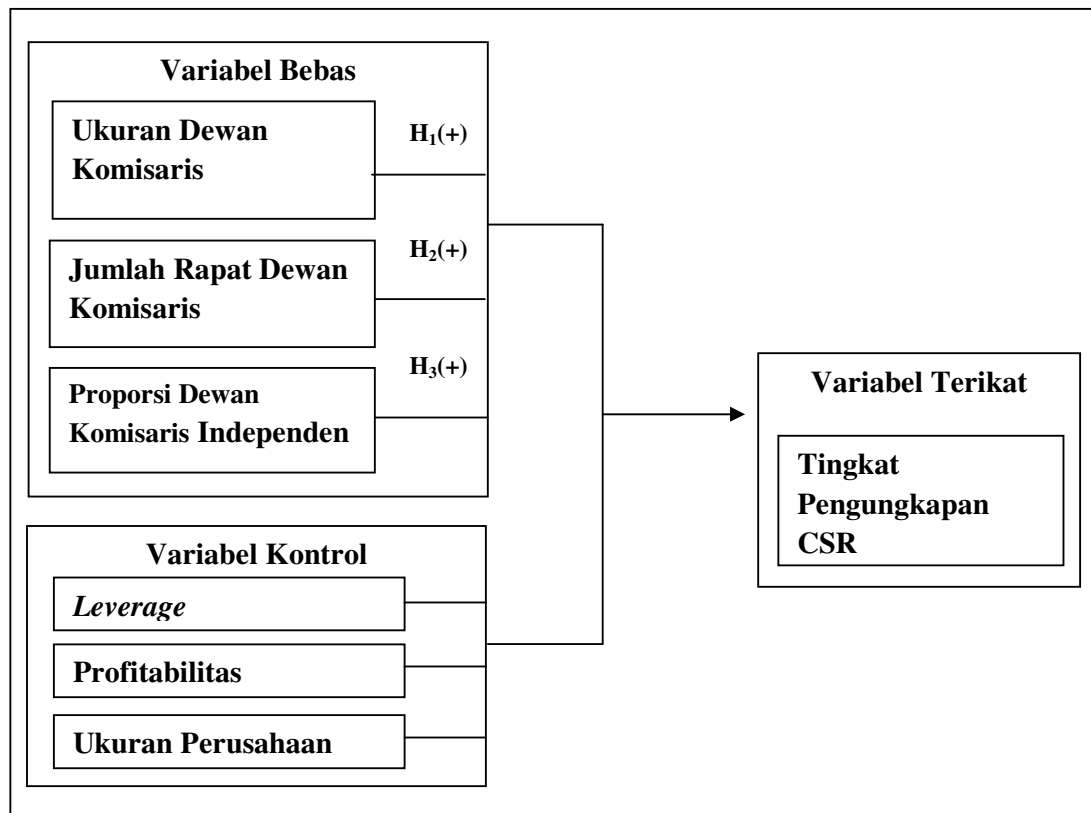
2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka serta beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti mengindikasikan faktor *good corporate governance* dalam hal ini dilihat dari Ukuran Dewan Komisaris, Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Proporsi Dewan Komisaris Independen sebagai variabel independen. Ukuran Perusahaan,

Profitabilitas dan *Leverage* perusahaan sebagai variabel control yang mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR.

Untuk membantu memahami *good corporate governance* yang mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR diperlukan suatu kerangka pemikiran. Dari landasan teori yang telah diuraikan diatas, disusun hipotesis yang merupakan alur pikiran peneliti, kemudian digambarkan dalam kerangka teoritis yang disusun sebagai berikut:

Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Elemen *Corporate Governance* dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Pengungkapan CSR

2.4.1.1 Ukuran Dewan Komisaris dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Pelaporan CSR

Dewan komisaris merupakan elemen paling penting dalam mekanisme *corporate governance* yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengawasi aktivitas bisnis yang dijalankan oleh direksi, apakah aktivitas bisnis tersebut dilaksanakan dengan sepatutnya. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG (KNKG, 2006). Namun, dewan komisaris tidak boleh ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional.

Peraturan mengenai ukuran dewan komisaris tercantum dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 108 Ayat (5), yang bunyinya adalah:

“Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka memerlukan pengawasan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat”.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh ukuran dewan dalam kegiatan perusahaan. Chen dan Jaggi (2000) dalam Akhtaruddin *et al.* (2009) menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan, maka akan semakin mengurangi asimetri informasi. Masalah ketidakpastian dan kekurangan informasi

dapat diminimalisir dengan ukuran dewan yang lebih besar (Bimbaum, 1984 dalam Akhtaruddin *et al.*, 2009). Penelitian oleh Erwansyah (2009) secara statistik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 2006-2007. Penelitian oleh Akhtaruddin *et al.* (2009), menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Ukuran dewan komisaris yang besar akan meningkatkan kemampuan dewan dalam memonitor proses informasi manajemen.

Menurut Akhtaruddin *et al.* (2009), kemampuan dewan komisaris dalam mengawasi akan lebih meningkat mengikuti penambahan anggota dewan komisaris. Semakin besar ukuran dewan komisaris, maka pengalaman dan kompetensi kolektif dewan komisaris akan bertambah, sehingga informasi yang diungkapkan oleh manajemen akan lebih luas, selain itu ukuran dewan komisaris yang lebih besar dipandang sebagai mekanisme *corporate governance* yang efektif untuk mendorong transparansi dan pengungkapan. Dengan demikian hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H1: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Tingkat Pelaporan *Corporate Sosial Responsibility*.

2.4.1.2 Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Pelaporan CSR

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan

kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006).

Literatur empiris tentang *corporate governance* menyatakan bahwa level independensi dewan berhubungan dengan komposisi, dan independensi akan memelihara efektivitas dewan tersebut. Webb (2004) dalam Said *et al.* (2009), menemukan bahwa perusahaan di Eropa yang memperoleh gelar “*socially responsible*” memiliki lebih banyak anggota komisaris independen apabila dibandingkan dengan perusahaan yang “*non-socially responsible*”. Studi oleh Webb ini juga menunjukkan bahwa komisaris independen memainkan peran penting dalam meningkatkan *image* perusahaan serta berperan dalam hal monitoring guna memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan sepatutnya oleh manajemen.

Komisaris independen dilihat sebagai alat untuk memonitor perilaku manajemen (Said *et al.*, 2009), yang nantinya menghasilkan lebih banyak pengungkapan sukarela mengenai informasi perusahaan. Forker (1992) dalam Said *et al.* (2009) menemukan bahwa semakin besar prosentase anggota independen yang ada pada dewan komisaris, akan meningkatkan aktivitas monitoring terhadap kualitas pengungkapan keuangan dan mengurangi kepentingan dari kegiatan menutup-nutupi informasi.

Penelitian oleh Wijayanti (2009) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara komposisi komisaris independen terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sector keuangan dan non-keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2006 dan 2007, namun tidak

menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini berarti semakin besar proporsi dewan komisaris independen, tidak menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan sukarela yang lebih luas (Wijayanti, 2009).

Penelitian oleh Huafang dan Jianguo (2007) dan Akhtaruddin *et al.* (2009) menunjukkan bahwa proporsi *independent non-executive directors* berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Beasley (1996) dalam Akhtaruddin *et al.* (2009) membuktikan bahwa proporsi *non-executive directors* berpengaruh dengan kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pengungkapan.

Berdasarkan definisi bahwa komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi yang dianggap dapat mendorong monitoring manajemen dengan lebih baik dan berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, sehingga hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H2: Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*.

2.4.1.3 Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Pengungkapan CSR.

Penelitian Xie *et al.* (2003) dalam Widowati (2009) menemukan bahwa semakin sering dewan komisaris bertemu atau mengadakan rapat, maka akrual kelolaan perusahaan semakin kecil. Hal ini berarti semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat maka fungsi pengawasan terhadap manajemen menjadi semakin efektif. Dengan demikian diharapkan dengan semakin efektifnya fungsi pengawasan, maka pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan juga akan semakin luas.

Penelitian Isshaq *et al.* (2009) menemukan bahwa rapat yang dilakukan dewan komisaris hanya sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *shareholders* dan sebagai dokumen bagi perusahaan. Rapat dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai perusahaan, karena dianggap dewan komisaris melakukan tugasnya dengan baik, yaitu pengawasan dan membahasnya dalam rapat pertemuan.

Berdasarkan definisi jumlah rapat dewan komisaris merupakan salah satu wujud nyata dari tugas yang dilakukan oleh dewan komisaris, sehingga hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H3: Jumlah Rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Sosial Responsibility*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menganalisis secara empiris mengenai pengaruh karakteristik perusahaan dan regulasi pemerintah terhadap tingkat pengungkapan CSR pada Laporan Tahunan perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian atas hipotesis-hipotesis yang telah diajukan. Pengujian hipotesis dilakukan menurut metode penelitian dan analisis yang dirancang sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti agar mendapatkan hasil yang akurat.

3.1.1 Variabel Terikat (dependen)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan CSR pada Laporan Tahunan perusahaan atau *Corporate Social Reporting Index* (CSRI). Kategori pengungkapan sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah kategori informasi sosial menurut Darwin (2004) dalam Anggraini (2006) yang meliputi *economic, environment, labor practices, human rights, society* dan *product responsibility*. Metode analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk

mengukur pengungkapan CSR. Standar yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan standar GRI (*Global Reporting Initiative*) yang diterbitkan tahun 2006, yang berjumlah 79 item, 33 aspek dan 3 dampak (Sosial, ekonomi dan lingkungan). Pengukuran pengungkapan CSR tersebut dilakukan dengan cara mengamati ada tidaknya suatu item informasi yang ditentukan dalam laporan tahunan, apabila item informasi yang ditentukan tidak ada dalam laporan tahunan maka diberi skor 0, dan jika item informasi yang ditentukan ada dalam laporan tahunan maka diberi skor 1. Pengungkapan sosial menunjukkan seberapa luas butir-butir pengungkapan yang disyaratkan telah diungkapkan. *Disclosure index* digunakan untuk mengetahui seberapa luas pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan. Penghitungan indeks yaitu dengan cara membagi jumlah item yang diungkapkan dengan jumlah item keseluruhan.

$$Disclosure\ index = \frac{Jumlah\ item\ informasi\ CSR\ yang\ diungkapkan}{79\ item\ informasi\ CSR\ versi\ GRI} \quad (3.1)$$

3.1.2 Variabel Bebas (Independen)

3.1.2.1 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris yang diangkat, bertugas, dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan member nasehat kepada direksi, seperti dalam penelitian Said *et al.* (2009).

$$Ukuran\ Dewan\ Komisaris = jumlah\ seluruh\ anggota\ dewan\ komisaris \quad (3.2)$$

3.1.2.2 Proporsi Komisaris Independen

Independensi dewan komisaris diukur dari prosentase jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris yang ada di perusahaan, seperti penelitian Said *et al.* (2009).

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota dewan komisaris}} \quad (3.3)$$

3.1.2.3 Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Jumlah rapat dewan komisaris merupakan jumlah pertemuan atau rapat internal yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam waktu satu tahun. Jumlah rapat dewan komisaris diukur dengan cara melihat jumlah rapat yang dilakukan dewan komisaris pada laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan.

$$\text{Jumlah Rapat Dewan Komisaris} = \text{jumlah seluruh rapat dewan komisaris} \quad (3.4)$$

3.1.3 Variabel Kontrol

3.1.3.1 Ukuran Perusahaan (*firm size*)

Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total asset yang dimiliki oleh perusahaan diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Ukuran perusahaan yang diukur dari total asset akan ditransformasikan dalam bentuk logaritma dengan tujuan untuk menyamakan dengan variabel lain, karena nilai total asset perusahaan relatif lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel lain dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Size} = \text{Logtotalasset} \quad (3.5)$$

3.1.3.2 Profitabilitas

Profitabilitas perusahaan diukur dengan ROE (*return of equity*). ROE dirumuskan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{total ekuitas}} \quad (3.6)$$

3.1.3.3 Leverage

Leverage yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya. Hal ini menggambarkan berapa tingkat kelebihan kewenangan yang dimiliki oleh *debtholders* dibandingkan dengan kewenangan *shareholders*. Rasio *leverage* diukur dengan membagi total utang dengan jumlah ekuitas perusahaan. *Leverage* perusahaan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total long-term debt}}{\text{total equity}} \quad (3.7)$$

3.2 Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2009 yang telah mempublikasikan laporan tahunannya. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan beberapa kriteria, yaitu :

1. Perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut terdaftar di BEI tahun 2007-2009.

2. Menerbitkan laporan tahunan tahun 2007-2009.
3. Memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa laporan tahunan (*annual report*) perusahaan *go public* yang terdaftar dalam BEI, yang merupakan rekaman historis mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Laporan tahunan (*annual report*) diperoleh dari Pojok BEI Fakultas Ekonomi UNDIP, *website* resmi BEI, dan *website* resmi perusahaan. Sedangkan data sekunder lainnya diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya, artikel, buku teks, dan referensi lain yang mendukung penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan pustaka yang diperoleh di perpustakaan, *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)*, *website* resmi BEI, *website* resmi perusahaan, dan Pojok BEI Fakultas Ekonomi UNDIP. Data kepustakaan yang dikumpulkan berupa konsep-konsep dan teori-teori yang dapat digunakan untuk penelitian ini didapat dari buku, dokumen, jurnal, dan sebagainya.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus dilakukan dalam penelitian ini, untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, mengingat tidak semua data dapat diterapkan

regresi. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji Normalitas, uji Multikolinearitas, uji Heteroskedastisitas dan uji Autokorelasi.

3.5.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji normalitas ini ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2009). Alat uji yang digunakan adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik *normal probability plot* dan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov* (1-sample K-S).

Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik *normal probability plot* adalah (Ghozali, 2009):

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi syarat normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z* (*I-Sample K-S*) adalah (Ghozali, 2009):

1. Apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti ada data residual terdistribusi tidak normal.
2. Apabila nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2009). Hal ini perlu dilakukan karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* kurang dari 0,10 atau *Variance Inflation Faktor* (VIF) dengan nilai lebih besar dari 10. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen yang lainnya.

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2009). Jika *variance* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas. Kebanyakan data *crosssection* mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dilihat dari grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID).

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2009):

1. Jika ada pola tertentu pada grafik, seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteriskedastisitas.

3.5.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi penelitian ini menggunakan titik kritis yaitu batas bawah d_l dan batas atas d_u . H_0 diterima jika nilai Durbin-Watson lebih besar dari batas atas nilai Durbin-Watson pada tabel.

Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan tabel Durbin-Watson (Ghozali, 2009):

1. Jika $d_u < d < 4 - d_u$, maka tidak ada autokorelasi positif atau negatif.
2. Jika $0 < d < d_l$, maka tidak ada autokorelasi positif.
3. Jika $d_l \leq d \leq d_u$, maka tidak ada autokorelasi positif.
4. Jika $4 - d_l < d < 4$, maka tidak ada korelasi negatif.
5. Jika $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$, maka tidak ada korelasi negatif.

Berdasarkan DW test yang telah dilakukan, nilai DW model regresi memenuhi syarat $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$ yang berarti H_0 tidak ada korelasi negatif. Keputusan yang diambil terhadap syarat tersebut adalah tidak ada keputusan. Dikarenakan pengujian autokorelasi menggunakan DW test belum menghasilkan keputusan maka dilakukan pengujian berikutnya yaitu *Run test* untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi.

Run test merupakan bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. *Run test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis).

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *run test* adalah (Ghozali, 2009):

1. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terjadi secara tidak random (sistematis).
2. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terjadi secara random (acak).

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan serangkaian tahap untuk menghitung dan mengolah data tersebut agar dapat mendukung hipotesis yang telah diajukan.

Adapun tahap-tahap penghitungan dan pengolahan data sebagai berikut:

1. Menghitung indeks CSR, yaitu dengan cara membandingkan total item yang diungkapkan perusahaan dalam *annual report* dengan total item yang ditentukan dalam GRI.
2. Menghitung karakteristik *corporate governance* yang diproksikan dalam ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris dan proporsi dewan komisaris independen.

Metode regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan terhadap model yang diajukan peneliti dengan menggunakan *Software SPSS Versi 17.0* untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan antara karakteristik perusahaan dengan pengungkapan sosial perusahaan, diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CSDI} = \beta_0 + \beta_1 \text{BDSIZE} + \beta_2 \text{BDIND} + \beta_3 \text{BDMEET} + \beta_4 \text{SIZE} + \beta_5 \text{LEV} + \beta_6 \text{ROE} + \varepsilon_i$$

Keterangan:

CSDI : indeks pengungkapan CSR

BDSIZE : ukuran dewan komisaris

BDIND : proporsi dewan komisaris independen

BDMEET : jumlah rapat dewan komisaris

SIZE : ukuran perusahaan

LEV : rasio *leverage (debt to equity ratio)*

ROE : rasio profitabilitas (*return on equity*)

ε_i : *error term*

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas dan uji autokorelasi terhadap model tersebut.

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Pada dasarnya ada 2 jenis alat statistik, yaitu statistik parametrik dan statistik non parametrik. Statistik parametrik digunakan jika distribusi data yang digunakan normal, sedangkan data yang bersifat tidak normal, maka uji statistik yang digunakan adalah statistik non parametrik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengujian statistik parametrik.

Menurut Ghozali (2009) ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar uji statistik parametrik dapat digunakan, yaitu:

1. Observasi harus independen
2. Populasi asal observasi harus berdistribusi normal
3. Varians populasi masing-masing grup dalam hal analisis dengan dua grup harus sama
4. Variabel harus diukur paling tidak dalam skala interval.

Jika distribusi data bersifat normal, maka digunakanlah uji statistik parametrik. Uji regresi merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik, untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti maka akan dilakukan uji koefisien determinasi, uji statistik t dan uji statistik F.

3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai Adjusted R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai Adjusted R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.5.3.2 Uji F (F test)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% maka criteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi $f < 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi $f > 0,05$, maka H_0 diterima, artinya semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Regresi Parsial (uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi 5%, maka criteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi $t < 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikansi $t > 0,05$, maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sampel Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2007-2009 dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Indonesia Capital Market Directory (ICMD) 2007-2009* diketahui bahwa perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI sebanyak 58 perusahaan. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang juga menerbitkan